

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Andianingsih, W. (2021). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap pada Distrik Navigasi Kelas III Pontianak. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)*, 11(1), 26-37.
- Biswan, A. T., & Falaqi, F. (2018). Praktik Akuntansi Aset Tetap Pada Pemerintah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Otonomi Keuangan Daerah*, 39-63.
- Dwitayanti, Y. &. (2018). Tinjauan Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada BKKBN Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, 4(1), 81-96.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Kustiani, A. N., & Hamzah, P. A. (2014). Dasar Dasar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua. *STAN PRESS. TANGERANG SELATAN*.
- Safitri, R. S., & Rahayu, Y. (2017). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan PSAP 07. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 2-13.
- Simarmata, E. S. (2019). TINJAUAN ATAS PENERAPAN PSAK NO. 16 ASET TETAP PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO) MEDAN.

Sunanto. (2017). Analisis Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tahun 2010 Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal ACSV Politeknik Sekayu*, 22.

Buku

Ambarwati. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Pati: Al Qalam Media Lestari.

Nazir. (1988). *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Gramedia.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

Sumber lainnya dan Website

Badan Pemeriksa Keuangan. (2012, September). *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2012*. Jakarta, Indonesia: Badan Pemeriksa Keuangan RI.

PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun (2020, Desember). *Catatan atas Laporan Keuangan Audited PSO Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran 2020*. Tanjung Balai Karimun, Indonesia: Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (8.2021). Diambil kembali dari [kemenkeu.go.id:https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm](https://kpbu.kemenkeu.go.id/read/21-18/pjpk/persyaratan-proyek/value-for-money-vfm)